

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dapat di lihat dari hasil pembahasan secara keseluruhan tahun 2017 dan 2018 pada Puskesmas Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada dokumen DPA konsistensi anggaran dan realisasinya pada tahun 2017 sudah sangat baik karena persentasenya 94%, sedangkan pada tahun 2018 konsistensi anggaran sudah sangat baik juga karena persentasenya 93%. Jadi dari tahun 2017-2018 konsistensi anggaran dan realisasinya pada dokumen DPA dikategorikan sangat baik.
2. Konsistensi perencanaan dan penganggaran Puskesmas Alak Kota Kupang berdasarkan analisis konsistensi antar dokumen (RUK dan RKA, RKA dan DPA) dengan menggunakan teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif Perencanaan dan Penganggaran untuk tahun 2017 dan 2018 masih terjadi ketidakkonsistensi kegiatan antara dokumen – dokumen tersebut. Untuk konsistensi program setiap dokumen, telah menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik karena setiap program telah diakomodir dalam setiap dokumen. Pada tingkat konsistensi anggaran antara RKA dan DPA Puskesmas Alak Kota Kupang tahun 2018 dikatakan kurang baik

dalam mengelola anggaran keuangan puskesmas karena pada tahun 2018 belum mencapai 100%, artinya ada 3 kegiatan yang tingkat deviasi <10%.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disarankan :

1. Bagi Puskesmas Alak Kota Kupang perlu memperhatikan konsistensi antara anggaran dan realisasinya serta antara dokumen kegiatan dengan cara:
 - (a).Diperlukan komitmen, komunikasi, dan informasi antar Puskesmas atau Dinas Kesehatan dalam meningkatkan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Puskesmas.
 - (b).Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam meminimalisir terjadinya inkonsistensi serta kesalahan dalam penginputan program dan kegiatan,
 - (c).Mengevaluasi program dan kegiatan yang menjadi prioritas Puskesmas sehingga visi/misi dapat tercapai dan dapat meningkatkan kinerja Puskesmas dalam Pengelolaan Keuangan.
2. Harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perencana dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan melalui pelatihan dan pendidikan Universitas.

DAFTAR PUSTAKA

Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016-2018

Febie Yandra (2011) *Analisis Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010*

Haryanto (2008) *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Penerbit Universitas Diponegoro

Jae K. Shim dan Joel G. Siegel. *Budgeting*, Penerbit Erlangga

Mardiasmo (2018) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta

_____, (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta

Mahmudi. (2010) *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *keuangan daerah*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 tentang *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan*

Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2019 tentang *“Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan”*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

RENSTRA *Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2017-2022*

Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahun 2017-2018

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017-2018

Saifuddin (2007) *“Analisis Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak Pada Puskesmas di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2007”*

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*

Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 *tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran*

Undang-Undang No. 55 Tahun 2018 *tentang Pedoman Pengguna Dana Dekonsentrasi Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2019*

Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*

Wiwin Kurniasi (2007) *“Analisis Proses Penyusunan dan Pentapan Anggaran Dinas Kesehatan Yang Bersumber Dari APBD Kota Tasimalaya”*